



**INSIGHT**

## 2023, Rifka Annisa Catat Ada 22 Kasus

**RIFKA** Annisa Women's Crisis Center (WCC) mencatat terjadi 22 kasus kekerasan seksual terhadap anak selama tahun 2023. Parahnya, dari jumlah itu dialami korban dari orang-orang terdekatnya. Seperti, tetangga, guru, bahkan orang tua sendiri.

Konselor Hukum Rifka Annisa WCC Lisa Oktavia menyampaikan, dari 22 kasus anak, rentang usianya dari 5-17 tahun. Lingkungan rumah tempat tinggal menjadi daerah yang paling rawan. Selama 2023, LSM ini mendampingi 138 kasus ■ *Baca 2023... Hal 7*

## 2023, Rifka Annisa Catat Ada 22 Kasus

*Sambungan dari hal 1*

Pendampingan yang dilakukan berupa konseling psikologi sesuai dengan kebutuhan atau dampak yang terjadi pada korban. Linda membeberkan, anak yang mengalami kekerasan seksual mendapat dampak yang negatif terhadapnya.

"Dampak psikologi murung dan takut, dampak sosial menarik diri dari lingkungan dan tidak mau sekolah, dampak kesehatan reproduksi penyakit menular seksual, luka di area vagina atau dubur," ungkapnya.

Dikatakan, dampak lainnya dapat menghambat perkembangan emosional pada anak. Seperti kesulitan keterampilan mengatasi dan mengelola emosi dan mengalami kebingungan atas reaksi emosional dari orang lain.

Selain itu, korban menilai pribadinya cenderung buruk. "Anak-anak yang dilecehkan menunjukkan kepercayaan diri rendah dan harga diri rendah, serta mengalami hambatan perkembangan sosial yang cenderung terbatas dengan orang lain," tuturnya. Linda mengungkapkan, damp

pak trauma yang tidak pernah diatasi seperti bisa menimbulkan beberapa gangguan psikologis, misalnya *post traumatic stress disorder* (PTSD), depresi, gangguan kecemasan, dan lainnya. Bila hambatan psikologis ini tidak diatasi dengan baik maka bisa berdampak mengganggu kehidupan sehari-harinya, baik dalam ranah personal, maupun sosial.

Dia menuturkan, cara pemulihan bisa dengan konseling psikologis, terapi kognitif, emosi, atau perilaku (tergantung bagian mana yang dirasa paling mengganggu). Hingga terapi obat-obatan dengan pengobatan psikiater bila memang diperlukan untuk menyeimbangkan senyawa kimia dalam otak. Tujuannya memperbaiki suasana hati dan emosi korban yang mengalami masalah psikologis berat.

Dia mengklaim, selama ini tidak ada kasus kekerasan seksual yang diselesaikan secara kekeluargaan. Semuanya berproses hukum.

**Jadi PR Sekolah hingga Orang Tua**

Mengomentari kasus kekerasan seksual terhadap anak SD di Kota Jogja, Wakil Ketua Komite Perlindungan Anak SDN Vidya Qasana Bahrul Arifin menuturkan, berbagai upaya preventif telah dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Salah satunya adanya tim pencegahan dan penanganan kekerasan (TPPK) di sekolah.

Bahrul mengungkapkan, selain pihak sekolah, orang tua atau wali murid juga punya peranan penting untuk turut digandeng dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. Salah satunya dengan dilibatkan dalam segenap sosialisasi dan upaya edukasi. "Kami rutin sosialisasi, di antaranya upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan secara daring," katanya kemarin (9/1).

Ia merinci secara umum berbagai topik turut diangkat termasuk juga soal kekerasan terhadap anak hingga tips menyoal parenting. Ia meyakini keterlibatan orang tua sangat penting. Jika tidak ada kerja sama antara orang tua dan pihak sekolah, maka sekolah juga akan kesulitan dalam mencegah kekerasan pada anak.

Lebih lanjut Bahrul memaparkan, selain upaya pencegahan, Komite Perlindungan Anak juga membuat silabus dan juga sejumlah SOP yang akan dilakukan jika terjadi tragedi kekerasan pada anak. "Misal ada dugaan kekerasan atau perlakuan tidak etis pada anak, itu wajib dilaporkan ke kepala sekolah," ungkapnya.

Disebutnya, laporan nantinya akan diteruskan kepada otoritas lanjutan, lalu dalam konteks yang lebih jauh akan dilakukan pengambilan langkah tegas. Salah satunya melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dan mendukung adanya tindakan hukum.

Sementara jika peristiwa itu terjadi di luar sekolah atau di dalam lingkup keluarga, maka pihak sekolah akan mengarahkan ke pusat pembelajaran keluarga (Puspaga) milik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). "Jika ada laporan mengenai kekerasan dalam hal apa pun, akan ada pelaporannya dan langsung ditindaklanjuti," lontarnya. (rul/iza/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 21 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005